

TAMBAH SEMBILAN PERANGKAT BERBASIS OTOMATIS

# EWS Dinilai Efektif Pantau Potensi Banjir Luapan

**YOGYA (KR)** - Keberadaan perangkat sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) dinilai efektif dalam memantau potensi banjir luapan di sungai-sungai besar. Pemkot Yogya pun berupaya menambah sembilan perangkat EWS berbasis otomatis yang akan disebar di tuga sungai besar di Kota Yogya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogya Nur Hidayat, menegaskan selain memanfaatkan EWS pihaknya juga melakukan pemantauan kondisi sungai selama 24 jam. Pemantauan itu dilakukan dengan peralatan telemetri yang bisa dipantau jarak jauh dari ruang kontrol di Kantor BPBD Kota Yogya. “Kita sudah adakan monitoring

lewat telemetri dan sudah otomatis nanti tersampaikan di PUSDALOPS BPBD. Setelah itu kita sampaikan lewat EWS. Kita juga sudah punya link dengan Kabupaten Sleman, sehingga monitor masalah informasi sungai sudah bisa dilaksanakan secara bagus,” terangnya, Jumat (31/1).

Sementara penambahan sembilan perangkat EWS dengan sistem oto-

matis akan dilakukan tahun ini. EWS dengan sistem otomatis itu akan dipasang masing-masing sebanyak tiga titik pada setiap Kali Code, Winongo dan Gajah Wong. Rinciannya EWS otomatis di Kali Code akan dipasang di wilayah Kampung Ledok Tukangan, Jagalan Beji dan Sorosutan. Di Kali Winongo dipasang di Kampung Serangan, Gampingan dan Suryo-

wijayan. Untuk EWS otomatis Kali Gajah Wong dipasang di Kampung Gendeng Timur, Balirejo dan Tegalendu. Upaya tersebut untuk meningkatkan pelayanan peringatan dini banjir kepada masyarakat agar respon waktu lebih cepat.

Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Yogya Darmanto, menambahkan keberadaan EWS dengan sistem otomatis akan memperkuat EWS sistem manual yang selama ini sudah terpasang. Selama ini ketiga sungai besar di Kota Yogya itu sudah dipasang EWS dengan sis-

tem manual menggunakan frekuensi UHF sebanyak 17 titik. Cara kerja EWS manual adalah jika terjadi kenaikan permukaan level air sungai yang terpantau melalui kamera CCTV dan informasi warga atau Kampung Tangguh Bencana (KTB) selanjutnya petugas PUSDALOP BPBD Kota Yogya akan memberikan peringatan melalui radio komunikasi UHF.

Sedangkan cara kerja EWS otomatis, Darmanto menyatakan ketika muka air sungai mengalami kenaikan level tertentu yang terpantau dari water level secara otomatis EWS

akan mengeluarkan bunyi peringatan. Diharapkan dengan sistem otomatis, warga sekitar bantaran sungai akan lebih siap untuk mengambil tindakan evakuasi. “Jadi EWS otomatis ini tentunya lebih cepat respon timenya karena level permukaan air terpantau lebih akurat dan sistem peringatan akan bekerja lebih responsif,” terangnya.

Menurutnya keberadaan EWS sangat penting sebagai alat peringatan dini guna meningkatkan kesiapsiagaan warga yang tinggal di bantaran. Adapun pengadaan EWS sistem otomatis menggu-

nakan APBD Kota Yogya 2025. Pagu anggaran pengadaan EWS otomatis di masing-masing sungai sekitar Rp 199,5 juta. Saat ini pengadaan EWS otomatis dalam tahap lelang pengadaan secara elektronik pada tahapan upload dokumen penawaran. “Diperkirakan EWS otomatis nanti akan dioperasikan sekitar akhir Februari 2025. Sebelum pemasangan telah dilaksanakan sosialisasi ke warga sekitar. Saat sudah terpasang kami juga akan melakukan simulasi yang melibatkan masyarakat dan KTB di sekitar EWS,” terang Darmanto. **(Dhi)-f**

## BERKONTRIBUSI DONGKRAK KESEJAHTERAAN

### Program CSR Dikolaborasikan Kejar Target Pembangunan

**YOGYA (KR)** - Keterlibatan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) turut berkontribusi dalam mendorong kesejahteraan. Program tersebut akan terus dikolaborasikan dengan pemerintah guna mengejar target pembangunan.

Target yang dimaksud tentunya pada aspek sosial yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Tahun lalu ada 159 program dengan realisasi terbanyak ialah kategori sosial, kesehatan, dan keagamaan,” tandas Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya Tri Retnani, Jumat (31/1).

Menurutnya realisasi program CSR mencerminkan kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dari total program yang terealisasi itu pun sebesar 69 persen untuk bantuan fisik dan 31 persen bantuan non fisik. Sementara total dana yang dikeluarkan oleh perusahaan melalui CSR pada tahun 2024 lalu mencapai Rp 2,8 miliar. Akan tetapi realisasinya jauh lebih besar karena belum semua perusahaan menyerahkan laporan dana CSR.

Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Kota Yogya Agustin Wijayanti, mengungkapkan jumlah dana yang masuk saat ini baru mencapai sekitar 40 persen dari total yang diperkirakan. Hal ini karena beberapa perusahaan baru melaporkan hingga triwulan kedua, mengingat mekanisme

pelaporan dilakukan setiap semester. “Jika mengacu pada tahun 2023, total dana TSLP mencapai Rp 10 miliar. Untuk tahun 2024, kemungkinan jumlahnya juga akan berada di kisaran tersebut. Namun, kami menghadapi kendala dalam pendataan karena tidak dapat mewajibkan perusahaan untuk segera melaporkan. Meski demikian, kami terus melakukan follow up agar laporan dari perusahaan segera kami terima,” ungkapnya.

Dirinya juga berharap pada tahun ini total dana CSR yang disalurkan oleh perusahaan di Kota Yogya juga mencapai nilai yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan bisa lebih besar agar manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat juga semakin optimal.

Agustin menegaskan laporan TSLP dari perusahaan merupakan bentuk akuntabilitas dalam pelaporan. Transparansi dalam pengelolaan dana sangat penting untuk menghindari potensi penyimpangan, seperti penggelapan atau duplikasi anggaran yang seharusnya sudah dibiayai oleh APBD.

Sementara itu dari data yang sudah masuk pada tahun 2024, tiga kategori program dengan alokasi dana terbesar adalah pemberdayaan SDM (29,2%), pendidikan (21,64%), dan keagamaan (17,03%). Sedangkan kategori dengan jumlah realisasi program terbanyak adalah sosial (32,08%), kesehatan (29,56%), dan keagamaan (11,95%). **(Dhi)-f**

## Pashmina Utamakan Peningkatan Kesehatan Remaja

**YOGYA (KR)** - Pimpinan Wilayah Nasviatul Aisiyyah (PWNA) DIY terus memfasilitasikan program Pelayanan Remaja Sehat Milik Nasviatul Aisiyyah (Pashmina). Nasyah DIY mengajak kader-kader Nasviatul Aisiyyah untuk memfasilitasikan agar program ini dapat terlaksana di sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Ketua PWNA DIY Syahdara Anisa Makruf SPDl MPdI menuturkan program Pashmina merupakan program unggulan dari Departemen Kesehatan Lingkungan PWNA DIY. “Program ini mengutamakan pada upaya peningkatan status kesehatan pada kelompok remaja di wilayah DIY,” katanya di acara sarasehan bertema ‘Nasyiah DIY Menuju Massifikasi Pashmina Goes to School’ di Aula Pp Muhammadiyah Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Sarasehan tersebut digelar oleh Departemen Kesehatan Lingkungan PWNA DIY dan dihadiri seluruh penggerak Pashmina se-DIY, perwakilan Departemen Kesehatan Lingkungan PDNA se-DIY serta pengurus PWNA DIY. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari TOT

Pashmina yang telah dilakukan pada Oktober 2024.

“Sarasehan ini diselenggarakan guna mengajak seluruh kader Nasviatul Aisiyyah PDNA se-DIY untuk bersama-sama memfasilitasikan program Pashmina supaya dapat terlaksana di sekolah-sekolah Muhammadiyah,” imbuh Syahdara.

Pimpinan Wilayah Aisiyyah DIY Dr Widyastuti SAg MM menuturkan bahwa kesehatan merupakan isu yang sangat strategis bagi perempuan. Hal ini karena setiap perempuan kelak akan menjadi seorang ibu, oleh karena itu diperlukan persiapan secara fisik, pemahaman yang baik terhadap kesehatan reproduksi, ilmu gizi, pola asuh yang baik bagi anak.

Sedangkan Pimpinan Pusat Nasviatul Aisiyyah, Ariati Dina Puspitasari menyampaikan bahwa Pashmina DIY harus kembali digiatkan, karena akar Pashmina berasal dari Kota Yogyakarta. Ia menekankan program Pashmina merupakan salah satu ‘ratunya’ program Nasviatul Aisiyyah sehingga harus terus diupgrade dan berinovasi. **(Dev)-f**

## 17 Februari, Makan Bergizi Gratis Kota Yogyakarta

**YOGYA (KR)** - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas dari pemerintahan. Kendati demikian sampai dengan Jumat (31/1) program tersebut belum sepenuhnya bisa dilaksanakan secara maksimal. Misalnya di Kota Yogyakarta sampai saat ini program tersebut belum bisa dilaksanakan. Karena setelah sempat mundur dari rencana, pelaksanaan program MBG di Kota Yogyakarta akan dimulai pada 17 Februari mendatang. Rencananya untuk sasaran awal akan dilaksanakan di empat sekolah di Kota Yogya.

“Berdasarkan informasi yang saya terima akan dilaksanakan pada 17 Februari, katanya itu sudah fix. Semoga saja tidak mundur lagi dan bisa benar-benar dilaksanakan di sekolah,” kata

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Yogyakarta Widiatmoko Herbimo di Yogyakarta, Jumat (31/1).

Pelaksanaan pilot project program MBG di Kota Yogya sudah mundur beberapa kali dari rencana awal. Wacana semula akan diadakan pada 2 Februari harus mundur lagi pada tanggal 17 Februari.

Widiatmoko mengatakan, berdasarkan

informasi yang diterimanya uji coba program MBG di Kota Yogya serentak akan dilakukan di beberapa sekolah. Selain SMKN 4 Yogyakarta rencananya juga akan dilaksanakan di SMPN 10 Yogyakarta, SMKN 6 Yogyakarta dan SD yang berlokasi di sekitar Kota Gede.

Adapun untuk targetnya sekitar 3.000 siswa, untuk SMKN 4 Yogya siswa yang akan mendapatkan MBG ada 617 siswa. “Rencananya pelaksanaannya nanti dari pihak catering mengirim makanan ke sekolah. Setelah itu pihak sekolah yang mengatur ke kelas-kelas,” ujarnya.

Terpisah, Sekda DIY Beny Suharsono menyatakan, pihaknta selalu siap untuk menjalankan program MBG di DIY. Bahkan Pemda DIY sudah menyisihkan anggaran Rp 42 miliar untuk melaksanakan program prioritas nasional tersebut. Begitu pula dengan kabupaten/kota sudah siap, diprioritaskan untuk anak sekolah. Semua itu dilakukan karena pelaksanaan MBG langsung dari pemerintah pusat melalui satuan kerja SPPG. Oleh karena itu tugas Pemda DIY adalah membantu menyukseskan program ini. **(Ria)-f**

## SOAL KRITIK DARI WALHI SOAL SAMPAH

### Jadi Bahan Evaluasi untuk Perbaiki Pengelolaan

**YOGYA (KR)** - Adanya masukan dari berbagai pihak untuk Pemda DIY berkaitan dengan pengelolaan sampah termasuk Walhi, akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola lingkungan ke depan. Jadi, Pemda DIY terbuka terhadap adanya masukan dari

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DIY berkaitan dengan permasalahan pengelolaan sampah dan limbah di Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Regional Piyungan.

“Adanya masukan atau kritik dari sejumlah elemen berkaitan dengan pengelolaan sampah di TPA Regional Piyungan akan kami terima. Kami menghormati pandangan itu. Saya kira rekomendasi juga konkret untuk dilakukan. Pemda

DIY telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan persampahan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono di Kompleks Kepatihan, Jumat (31/1).

Beny mengungkapkan, penanganan dan pengelolaan sampah membutuhkan komitmen dari semua pihak. Oleh karena itu Sekda DIY menekankan penanganan sampah harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata, bukan sekadar retorika. Sebagai bentuk keseriusan dari hal itu setiap kabupaten dan kota yang meminta tambahan kuota distribusi sampah ke TPA Piyungan telah difasilitasi. Kendati demikian, tumpukan sampah di beberapa depo, khususnya di Kota Yogyakarta, masih menjadi persoalan.

“Kemarin kami sudah dis-



KR-Riyana Ekawati  
**Beny Suharsono**

po ke DLH untuk bantu kosongkan sampah, minta 1.000 ton ternyata belum begitu berpengaruh. Kondisi ini menjadi tantangan bagi kita bersama agar persoalan ini bisa segera diselesaikan,” ungkapnya.

Sementara itu saat dimin-

tai tanggapan soal isu limbah air lindi yang disebut mencemari Sungai Opak dan sumur warga, Beny memastikan bahwa lindi dari TPA Piyungan tidak dibuang langsung ke sungai. “Lindi di TPA Piyungan itu tidak dibuang ke Sungai Opak, ada penampungan-nya sendiri yang selama ini sudah disiapkan,” ujarnya.

Sebelumnya Walhi DIY menilai pengelolaan sampah di DIY masih jauh dari kata berhasil. Bahkan Kepala Divisi Kampanye Walhi DIY, Elki Setiyo Hadi, menyebutkan bahwa selama tahun 2023 hanya 28,69 persen sampah di TPA Piyungan yang terolah. Sedangkan sisanya, sekitar 1.046 ton sampah per hari, dibuang tanpa upaya pengurangan dan penanganan yang memadai. **(Ria)-f**

## DORONG PEMBIAYAAN EKONOMI RAKYAT, BRI Salurkan KUR Rp184,98 Triliun Kepada 4 Juta Pelaku UMKM Di Tahun 2024



KR ISTIMEWA

**BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan pelaku usaha kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.**

**JAKARTA (KR)** - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Sepanjang tahun 2024, BRI berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp184,98 triliun, menjadikannya yang tertinggi diantara perbankan nasional lainnya. Penyaluran KUR BRI itu pun menjangkau lebih dari 4 juta debitur atau pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia, memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Upaya BRI tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja. Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

Capaian BRI tersebut selaras dengan Asta Cita ketiga Pemerintah Indonesia, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pengembangan infrastruktur. Selain itu, keberhasilan BRI dalam penyaluran KUR juga turut

mendukung misi Asta Cita keenam, yakni membangun dari desa dan dari bawah, guna mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa penyaluran KUR BRI yang mencakup lebih dari 4 juta debitur UMKM di seluruh wilayah Indonesia berfokus pada sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan.

"Program ini menjadi salah satu wujud nyata peran BRI dalam mendukung program Asta Cita terutama pada peningkatan lapangan kerja yang berkualitas serta mendorong kewirausahaan," ujarnya.



KR ISTIMEWA

**Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan BRI membuat kerajinan ayaman bambu.**